

FENOMENOLOGI SOCIAL VALUE DALAM MENGURANGI BIAYA POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ROMBASAN SUMENEP

Ummi Masruroh¹, Evi Malia², Ika Oktaviana Dewi³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura

Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan

Email: ummimasruroh86@gmail.com¹, evi.malia@uim.ac.id²,

Correspondent : ummimasruroh86@gmail.com

Abstract

This research aims to describe social value in reducing political costs in village head elections using a qualitative phenomenological approach. The results of this research show that social values in selecting village heads are very important. The village head received high trust from the Rombasan community to become village head based on his sense of helpfulness. Meanwhile, in terms of norms, the village head has good norms that he has cultivated before becoming village head, namely simple and down-to-earth behavior, and in networks, the village head has relatives and neighbors who support him as village head, both morally and materially. So the social value possessed by the village head of Rombasan can reduce the political costs he personally incurs, but does not reduce the total political costs as a whole because in terms of costs he has a lot of help from his supporters.

Keywords: social value, political costs, village head election

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai sosial dalam mengurangi biaya politik dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai sosial dalam pemilihan kepala desa sangat penting. Kepala desa mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat Rombasan berdasarkan rasa suka menolongnya. Dari sisi norma, kepala desa memiliki perilaku sederhana dan membumi yang telah ditanamkan sebelum menjadi kepala desa. Sedangkan dari sisi jejaring, kepala desa memiliki keluarga dan tetangga yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Dengan demikian, nilai sosial yang dimiliki oleh kepala desa Rombasan dapat mengurangi biaya politik yang dikeluarkan secara pribadi, meskipun secara total tidak mengurangi biaya politik secara keseluruhan karena banyak mendapat bantuan dari para pendukungnya.

Kata Kunci: nilai sosial, biaya politik, pemilihan kepala desa

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa (Kalebun dalam Bahasa Madura) merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi dalam lingkup yang paling dekat sekaligus dalam lingkup terkecil masyarakat, yakni didesa melalui pilkades ini dipilihnya pemimpin yang akan menahkodai jalannya pemerintahan desa untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakat. Pilkades Sebagai wadah menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa. Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tentunya, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa. Maryuni,(2020).

Pilkades memungkinkan setiap warga desa yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan memimpin desanya. Pilkades tidak dapat dipisahkan dari praktik politik transaksional atau pertukaran sosial. Prilaku masyarakat desa sebagai pemilih dalam pilkades adalah pemegang suara yang dapat melakukan pertukaran dengan calon kades. Dalam kenyataannya pilkades bukan semata-mata perebutan jabatan atau kekuasaan dalam rangka suksesi kepemimpinan di desa. Pilkades juga bukan semata-mata adu strategi antar calon kades untuk mendapat dukungan pemilih. Lebih dari itu, pilkades merupakan sarana politik untuk memenuhi hasrat berkuasa, prestise, harga diri dan kehormatan calon kades. Ciptono, (2019).

Dalam konteks masa kini, kepemimpinan kepala desa memang banyak mengalami pergeseran dimana seorang kepala desa bukan hanya harus memiliki kemampuan adaktif terhadap budaya lokal (*cultural leadership*), akan tetapi juga dituntut memiliki kemampuan administratif (*administrative leadership*). Kenyataan ini tidak lepas dari intervensi regulasi yang menempatkan posisi atau kedudukan desa disamping sebagai entitas yang memiliki otonomi, tetapi di posisi lain juga merupakan bagian dari pemerintahan nasional sehingga kepala desa sesungguhnya juga pemimpin pemerintahan. Dalam pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka seorang pemimpin pemerintahan dalam level apapun harus mampu memanfaatkan manajemen yang dijalankan dengan kompeten untuk mengurus sumber daya dalam rangka memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, dan akuntabilitas Aminah dalam (Astuti et al.,2019).

Kualitas kepemimpinan desa ini tentu tidak dapat dilepaskan dari mekanisme dalam menentukan atau melahirkan pemimpin yaitu kepala desa. Pilkades sebagai mekanisme dalam proses memilih pemimpin merupakan peristiwa politik ditingkat desa yang paling menarik karena munculnya berbagai peristiwa yang menyertainya, seperti konflik di antara calon dan

pemilih, munculnya protes sebagai respon terhadap ketidakpuasan hasil pengumuman suara, politik uang, hingga pada pengumuman suara yang diulang karena kemenangan kotak kosong (Nashrudin, 2016).

Masyarakat menerima dengan baik latar belakang kepala desa yang artinya masyarakat tidak menilai dari pekerjaannya, perekonomian bahkan pendidikan, itu semua dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan harga image nasional memang kepala desa rombisan sumenep diakui dapat berbaur dengan masyarakat dan selalu terlibat dalam setiap kegiatan masyarakat, maka sebab itu kepala desa dapat dijadikan panutan dan citra positif bagi masyarakat. Kepala desa rombisan sumenep tidak hanya pada saat pencalonan saja yang terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat, namun jauh dari sebelum pencalonan kepala desa memang sudah terbiasa dalam kehidupan bergaul, bermasyarakat dan bergotong royong (Eriko, 2018).

Secara umum biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon kepala desa yaitu biaya pendaftaran dan biaya kampanye, biaya kampanye salah satunya yaitu dengan menggunakan “ tradisi” agama seperti pemberian berkat pada setiap pengajian, acara-acara salamatan dan acara-acara silaturahmi lainnya. Berkat merupakan pemberian barang bisa berupa makanan sembako, kerudung, baju dan bahkan uang. Selain itu dilakukan pula melalui pemberian sedekah dari para calon kepala desa kepada masyarakat pemilih penggunaan tradisi agama islam dilakukan untuk mengaburkan istilah politik uang yang memiliki konotasi negatif. Dan biasanya sang calon mengadakan pertemuan dengan tamu dan para pendukungnya atau bila si calon datang ke suatu tempat untuk berkampanye untuk kemenangannya dapat dikatakan ini adalah uang politik, biaya atau ongkos politik. Dengan berkembangnya metode kampanye yang memanfaatkan media massa, seperti surat kabar, radio dan televisi, akhirnya kampanye di media massa khususnya televisi, yang semakin mahal, juga berdampak langsung pada penambahan biaya kampanyenya (Yuningsih dan Subekti, 2016).

Menurut Mietzner (2015), saat ini tren global memperlihatkan dua indikasi dalam pemilu dan demokrasi, yakni meningkatnya biaya kampanye elektoral seiring dengan penggunaan iklan media sebagai strategi menggaet pemilih dan nantinya dirancang dan dilakukan oleh anggotanya, tetapi dilakukan oleh konsultan politik yang mahal. Bahkan konsultan politik tersebut telah menyiapkan tim yang berbeda dari struktur yang disiapkan oleh kandidat. Disisi lain hal yang menarik diperhatikan adalah bahwa sumber pendanaan partai politik tidak terorganisir secara baik dibanyak tempat. Oleh karena itu, bagi sebagian para calon merasa bahwa kebutuhan pemenangan hanya perlu dilakukan oleh timnya sendiri,

tanpa merasa perlu melibatkan organ struktur partai politik.

Biaya politik adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenangkan pemilu (Fitriyah, 2013), untuk menjadi calon kepala daerah diperlukan biaya “sewa perahu” yaitu biaya yang dibayar sebelum atau sesudah penetapan calon kepala desa. Kadang pula terdapat pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu pada calon kepala desa bahkan menentukan siapa yang akan terpilih sebagai kepala desa. Hal tersebut menunjukkan beberapa calon kepala desa berpotensi terlibat politik uang. Politik uang didefinisikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu (Irawan, 2015). Politik uang terjadi tidak hanya pada saat penetapan calon melainkan sampai dengan termasuk pembelian suara ke pemilih.

Pemilihan kalebun di kabupaten sumenep di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor pendidikan. Pendidikan di anggap sebagai sebuah alat menuju individu menuju pada proses pendewasaan. Pemberian pendidikan yang semakin tinggi juga akan mempengaruhi rasionalitas dari individu (Elsas, 2015). Keberadaan pendidikan dapat memberikan perubahan bagi masyarakat desa utamanya, karena akan merubah pola pikir yang sudah tertanam dalam pemikirannya.

Akan tetapi berbeda dengan kepala desa di Desa Rombasan. Kepala desa terpilih pada tahun 2021 ialah seorang yang daftar riwayat pendidikannya hanya menempuh sampai SD (Sekolah Dasar), dan ekonomi keluarganya berasal dari ekonomi menengah kebawah dibuktikan dengan kondisi rumah yang masih berasal dari tripleks dan pekerjaan utamanya pun hanyalah sebagai tukang gergaji kayu keliling (*somel*). Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Sholikin, 2019 dan Haluana’a, 2019 yang menyatakan bahwa semuanya dipengaruhi dari riwayat pendidikan dan biaya politik dalam kontekstasi politik tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama adalah kepala desa Rombasan yang terpilih pada tahun 2021. Analisis data dilakukan menggunakan teknik fenomenologi transendental melalui tahapan noema, noesis, epoche, intentional analysis, dan eidetic reduction untuk menemukan esensi fenomena nilai sosial dalam mengurangi biaya politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami bagaimana nilai sosial (*social value*) dapat berperan dalam mengurangi biaya politik pada pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Rombasan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep. Fokus utama analisis adalah pada tiga komponen utama nilai sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), dan jejaring sosial (*networking*), serta keterkaitannya dengan pengeluaran politik calon kepala desa.

Kepercayaan (Trust)

- **Makna:** Kepercayaan masyarakat muncul karena kedekatan personal dan rekam jejak sosial calon kepala desa sebelum pencalonan.
- **Temuan:** Kepala desa terpilih (Bapak Mahrus) **tidak mencalonkan diri atas keinginan pribadi**, melainkan atas **dorongan dan dukungan masyarakat** yang percaya pada integritas serta kesederhanaannya.
- **Implikasi:** Kepercayaan ini **mengurangi kebutuhan biaya kampanye**, karena masyarakat secara sukarela mendukung tanpa imbalan finansial.

Norma (Norms)

- **Makna:** Norma mencakup perilaku sosial dan moral yang dijunjung tinggi calon kepala desa.
- **Temuan:** Kepala desa memiliki **perilaku sederhana, suka menolong, dan dekat dengan masyarakat** jauh sebelum pemilihan. Ia sering terlibat dalam kegiatan sosial, membantu warga tanpa pamrih, dan aktif merangkul anak muda.
- **Implikasi:** Norma sosial yang positif menciptakan **citra baik dan legitimasi moral**, sehingga tidak perlu melakukan praktik politik uang untuk meraih simpati masyarakat.

Jejaring Sosial (Networking)

- **Makna:** Jaringan sosial adalah hubungan kekerabatan, pertemanan, dan kedekatan komunitas yang saling mendukung.
- **Temuan:** Dukungan kuat datang dari **keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar** baik dalam bentuk **dukungan moral maupun bantuan materi (uang, tenaga, logistik)**.
- **Implikasi:** Jaringan sosial ini **menjadi sumber daya non-finansial** yang signifikan, membantu calon kepala desa menekan biaya kampanye secara langsung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomenologi nilai sosial memiliki peran penting dalam mengurangi biaya politik dalam pemilihan kepala desa. Kepercayaan, norma,

dan jejaring sosial menjadi modal sosial yang kuat bagi calon kepala desa untuk memperoleh dukungan tanpa mengeluarkan biaya politik yang besar. Implikasinya, nilai sosial dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan kontestasi politik yang lebih berintegritas dan efisien di tingkat desa.

Kutipan dan Refrensi

- Arifin, S., dan Muhtadi, N. A. (2020). Analisis Dana Kampanye Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilu Serentak 2019.
- Astrika, L., Sulistiawati., dan Astuti, P. (2019). Kontestasi Pasangan Suami Istri Dalam Pilkadaes.
- Astuti, D. P., dan Sukowati, O. (2019). Peran Sabet Kepala Desa Terpilih Dalam Pilkadaes Prambatan Kidul Pada Pilkadaes Serentak Kabupaten Kudus Tahun 2019.
- Dastrawan, N. A. (2021). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila.
- Dewi, S. R. (2019). Akuntansi Biaya.
- Haluana'a, F. J. (2019). *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa*.
- Jumhana, E., dan Nashrudin, A.P. (2022). Rivalitas Suami Istri Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa.
- Kuswarno, E. (2019). Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi: Konsep, Pedoman, Dan Contoh Penelitian.
- Moelang, L. J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Roadakarya
- Mudjiyono., (2012). Investasi Dalam Saham Dan Obligasi Dan Meminimalisasi Resiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia
- Muzdalifahaziz., (2015). Manajemen Investasi.
- Nawawi, J. (2012). Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance.
- Pratiwi, I. (2015). *Analisis Pengaruh Sensitivitas Politik Terhadap Biaya Politik (Studi Empiris Pada Penyedia Barang/ Jasa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*
- Pujileksonno, S., dan Ciptono. (2019). Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Pertukaran Sosial Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Desa Sumberanom 2019 Kecamatan Rekkerek Kabupaten Tuban.
- Sandi, J. R. A., dan Eriko, D. (2018). Startegi Pemasaran Politik Kepala Desa Pertahanan Dalam Pemilihan Kepala Desa Simpang Naneng Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.

- Sitorus., dan L. R. Maryuni. (2020). Implementasi Kebijakan E-voting Dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
- Solihah, R. (2016). Politik Transaksional Dalam Pilkada Serentak Dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah Di Indonesia.
- Subadi, T. (2006). Metode Penelitian Kualitatif.
- Subekti, V. S., dan Yuningsih, N.Y. (2016). Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
- Sugiono,. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D: Bandung Alfabeta
- Tandelilin, E. (2012). Dasar- Dasar Manajemen Investasi.
- Wance, M., dan Rukoyah. (2021). Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
- Pratama, R. S. (2023). Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa di Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate.
- Astuti, P., dan Marlina. N. (2022). Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi pemilih?.